



Dampak Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada BLUD RSUD Campurdarat

Ibravita Dwi Annisa¹, Sindy Nur Aisyah², Riska Amellia Putri³,
Elysia Septi Amanda⁴, Aqilla Nabbihah⁵, Irfan Fauzi⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

* Penulis Korespondensi: ibravitadwiannisa@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine how the limited human resources of the Regional Public Service Agency (BLUD) of Campurdarat Regional Hospital affect the efficiency of financial management. The background of this study is the lack of professional human resources (HR) in the financial sector, which can hinder the effectiveness, accuracy of reporting, and transparency of hospital financial governance. To obtain a comprehensive picture of the financial management situation at Campurdarat Regional Hospital, the methodology used was interviews, observation, and documentation studies. This research in the study findings shows that although financial management has been implemented in accordance with regulations, such as the values of transparency and accountability, the lack of human resources causes a number of problems, including high employee workloads, delays in financial reporting, and errors in recording drug receivables to third parties. This condition will hamper cooperation between units and reduce the effectiveness of internal supervision. The quality of human resources is a crucial component in realizing effective and efficient public financial governance, according to institutional and resource theories. Therefore, to ensure more effective, accountable, and sustainable financial management in the Campurdarat Regional Public Service Agency (BLUD), capacity building through continuous training, recruitment of professional staff, and optimization of the role of the Internal Supervisory Unit (SPI) is very crucial.*

Keywords: BLUD; Effectiveness; Financial Management; Human Resources; RSUD Campurdarat.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana dampak keterbatasan SDM Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Campurdarat memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi minimnya tenaga profesional sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan, yang dapat menghambat efektivitas, akurasi pelaporan, dan transparansi tata kelola keuangan rumah sakit. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi pengelolaan keuangan di RSUD Campurdarat, metodologi yang digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dalam temuan studi menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, seperti nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, kurangnya sumber daya manusia menyebabkan sejumlah masalah, termasuk beban kerja pegawai yang tinggi, keterlambatan dalam pelaporan keuangan, dan kesalahan dalam pencatatan piutang obat pada pihak ketiga. Kondisi ini akan menghambat kerja sama antarunit dan mengurangi efektivitas pengawasan internal. Kualitas sumber daya manusia sebagai komponen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif dan efisien, menurut teori kelembagaan dan sumber daya. Oleh karena itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Campurdarat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, rekrutmen tenaga profesional, dan optimalisasi peran Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi sangat krusial.

Kata kunci: BLUD; Efektivitas; Pengelolaan Keuangan; RSUD Campurdarat; Sumber Daya Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan di sektor pelayanan kesehatan publik, khususnya pada RSUD, merupakan elemen penting untuk menjaga keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti tertuang pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Di Indonesia, RSUD sering kali bergantung pada alokasi anggaran dari pusat daerah melalui APBD, yang mencakup dana operasional, investasi infrastruktur, dan pelayanan medis. Badan Layanan Umum Daerah sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah memiliki fleksibilitas

dalam pengelolaan dana, namun tetap dituntut untuk transparan, akuntabel, serta efisien dalam penggunaannya. Pengelolaan dana yang efektif memiliki pengaruh pada nilai pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Juliani, 2018).

Penerapan status BLUD sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 110 Tahun 2018 memberi peluang optimalisasi pengelolaan dana. Namun, transisi ke model ini juga membawa tantangan, khususnya dalam pengendalian debit dan kredit yang kompleks, serta potensi ketidakseimbangan arus kas akibat akumulasi piutang atau hutang. Dalam praktiknya, efektivitas tata kelola dana BLUD tidak semata-mata berpegang pada sistem dan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kecukupan SDM, terutama dalam aspek administrasi dan keuangan (Zubaidi et al., 2019).

Pada penelitian sebelumnya oleh Amelia Putri Nurchoiriyah, Emeliatu Sofia, Fathul Beri, dan Mohamad Djasuli (2025) telah membahas fleksibilitas keuangan BLUD dan pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan, namun masih terbatas yang secara spesifik menyoroti peran SDM dalam efektivitas pengelolaan keuangan di level RSUD, terutama di daerah dengan keterbatasan kapasitas organisasi. Dimana gap penelitian ini menunjukkan perlunya penelitian yang fokus pada hubungan antara kapasitas SDM dan efektivitas pengelolaan dana BLUD.

Sebaliknya, keterbatasan SDM berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penyusunan laporan, kesalahan pencatatan, hingga pengambilan keputusan yang kurang tepat dalam pengelolaan dana. Salah satu studi kasus yang relevan adalah pada RSUD Campurdarat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Meskipun telah berstatus BLUD, rumah sakit ini menghadapi keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di bidang keuangan, yang berpotensi menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara optimal.

Berdasarkan kejadian fenomena di atas maka penelitian ini berfokus pada dampak yang di timbulkan dari keterbatasan sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan yang ada pada BLUD RSUD Campurdarat.

2. KAJIAN TEORITIS

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia yaitu tenaga, pikiran, kemampuan, keahlian yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perorangan atau organisasi. Di dalam organisasi atau instansi, SDM merupakan aset terpenting karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian visi-misi. Sumber daya fisik,

keuangan, dan manusia suatu organisasi menentukan tingkat keunggulannya. Sumber daya manusia yang manajerial, terampil, dan berkualitas merupakan aset strategis yang esensial untuk mencapai efektivitas organisasi. Berdasarkan hal ini, pengelolaan keuangan BLUD bergantung pada keterampilan SDM yang menjalankan sistem dan aturan itu sendiri. Menurut penelitian Zubaidi (2019), kompetensi SDM dalam aspek keuangan dan akuntansi berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan, ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BLUD, yang mensyaratkan pengetahuan teknis dan pemahaman akuntansi yang memadai untuk menjamin pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas yang efisien.

RSUD Campurdarat

Rumah sakit merupakan tempat yang memfasilitasi segala bentuk perawatan, berupa layanan kesehatan. Rumah sakit dapat menawarkan layanan penyembuhan, pemulihan, pencegahan, dan promosi kesehatan, selain itu juga menjadi pusat rujukan dan tempat pendidikan serta pelatihan kedokteran. RSUD Campurdarat dr. Karneni dikenal sebagai instansi kesehatan di bawah naungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. RSUD Campurdarat dr. Karneni berlokasi di Kec. Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Pengelolaan Keuangan

Menurut Permendagri No. 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah berwenang dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Restianto dan Bawono (2020) komponen penting dalam pengelolaan keuangan BLUD adalah dana, pengeluaran, pemasukan, manajemen kas, terutang, pembiayaan, estimasi dana, laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, audit, kepegawaian, dan kompensasi. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tujuan utama pengelolaan keuangan BLUD adalah memastikan keberlangsungan layanan publik melalui tata kelola keuangan yang baik. Menurut Wiwi Idawati dan Lia Eleonora (2020), penerapan pengawasan internal yang baik berkontribusi dalam akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga layanan kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan analisis yang terperinci mengenai bagaimana keterbatasan Sumber Daya Manusia memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD RSUD Campurdarat. Penelitian ini berfokus pada

pemahaman tentang fenomena sosial terkait pengelolaan keuangan, dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, pengalaman, dan pandangan dari para pelaku pengelolaan keuangan dan manajemen rumah sakit. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara menyeluruh kondisi sebenarnya di lapangan serta menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan, khususnya yang terkait dengan keterbatasan SDM, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan ke depan. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghubungkan temuan dengan teori dan kondisi nyata di BLUD RSUD Campurdarat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang luas dan terperinci mengenai hambatan yang timbul akibat keterbatasan sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan keuangan rumah sakit

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen keuangan di BLUD RSUD Campurdarat secara umum mengikuti peraturan, terutama Permendagri No. 79 Tahun 2018. Dana untuk BLUD berasal dari layanan kesehatan, kamar rawat inap, obat-obatan, kolaborasi, sumbangan, dan anggaran pemerintah daerah. Perencanaan dilakukan melalui RSB lima tahun dan RBA tahunan berbasis kinerja. Pelaksanaan anggaran ditulis dalam DPA, yang disetujui oleh PPKD. Proses keuangan, seperti pengelolaan kas, piutang BPJS, dan pengadaan aset, dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan basis akrual. Laporan keuangan disiapkan oleh bendahara dan mengikuti SAP, meskipun tinjauan Inspektorat 2024 belum dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, PPKD, dan SPI, yang baru dibentuk tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Secara keseluruhan, sistem manajemen keuangan stabil, tetapi ada kebutuhan untuk fungsi audit internal yang lebih kuat. Masalah utama adalah kurangnya staf keuangan, baik dalam jumlah maupun kompetensi. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi tanpa personel yang memadai, yang memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan akurasi pelaporan. Salah satu dampak yang jelas adalah piutang obat dari pihak ketiga tidak tercatat dengan benar karena tidak dilaporkan, yang menimbulkan risiko inkonsistensi dalam laporan keuangan. Keterbatasan ini juga berisiko memperlambat koordinasi, meningkatkan kesalahan dalam pencatatan, dan mengurangi transparansi. Berdasarkan teori kelembagaan dan teori sumber daya, kualitas sumber daya manusia menentukan efektivitas tata kelola. Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan

dana publik merupakan amanah yang harus dijaga untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia dan optimalisasi fungsi SPI agar pengelolaan keuangan BLUD dapat efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Campurdarat

Dana BLUD adalah dana yang diperoleh secara mandiri oleh RSUD Campurdarat dari pemberian layanan kesehatan, kamar inap, dan obat. Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Campurdarat telah berjalan sesuai ketentuan regulasi dengan hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RSB lima tahunan dan RBA (rencana belanja tahunan) berbasis kinerja, dengan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, serta pendapatan sah lainnya. Pelaksanaan anggaran dituangkan dalam DPA yang disahkan PPKD dan telah disesuaikan sesuai kebutuhan. Seluruh proses pengelolaan kas, piutang (khususnya klaim BPJS), pendapatan-belanja, serta pengadaan barang dan aset daerah dilakukan transparan dan akuntabel dengan basis akrual.

Pertanggungjawaban disusun secara rutin oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran, sementara laporan keuangan disusun mengikuti SAP dan Permendagri 79/2018 meskipun reviu inspektorat tahun 2024 belum dilaksanakan. Dari sisi pengawasan, pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan PPKD, serta SPI internal yang baru terbentuk pada 2024 namun belum optimal fungsinya (Idawati & Eleonora, 2020). Dengan demikian, sistem keuangan BLUD RSUD Campurdarat sudah cukup solid, namun penguatan pada aspek audit internal masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kontrol dan memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Sumber Daya Manusia BLUD RSUD Campurdarat

Permasalahan yang dihadapi BLUD RSUD Campurdarat adalah keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Pihak-pihak SDM meliputi pejabat pengelola keuangan seperti direktur, bendahara, pejabat penata usahaan, serta Satuan Pengawas Internal (SPI), di samping Dinas Kesehatan dan Bupati Tulungagung sebagai regulator. Permasalahan SDM terjadi di lingkungan BLUD RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada periode pengelolaan anggaran 2022–2024, di mana rumah sakit harus mengelola dana kapitasi BPJS dan pendapatan non-BPJS sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Keterbatasan ini muncul karena beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang proporsional, sehingga berisiko menurunkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan kurangnya pengawasan terkait piutang. Berdasarkan teori ekonomi kelembagaan dan teori sumber daya, keberhasilan institusi publik seperti BLUD sangat ditentukan oleh kualitas SDM sebagai faktor produksi utama. Keterbatasan tenaga ahli

keuangan meningkatkan biaya transaksi, memperlambat koordinasi, dan dapat memengaruhi akurasi serta ketepatan waktu pelaporan keuangan (Lusiana Badriah Hartono dan Azhar Affandi, 2024). Meskipun evaluasi menunjukkan tidak ada ketidakpatuhan dalam penggunaan dana kapitasi dan non-kapitasi, efektivitas jangka panjang tetap terancam jika permasalahan SDM tidak segera diatasi.

Dampak Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada BLUD RSUD Campurdarat.

Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Campurdarat telah berjalan sesuai regulasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan SDM di bidang keuangan dimana dampak keterbatasan SDM pada pengelolaan keuangan dilandasi oleh adanya piutang obat oleh pihak lain yang mana piutang pinjaman tersebut tidak di informasikan kepada manajemen BLUD RSUD Campurdarat sehingga akan berpengaruh terhadap proses pencatatan yang berdampak pada proses pengelolaan keuangan karena piutang tersebut akan masuk pencatatan bagian laporan piutang. Yang mana apabila piutang tersebut tidak dilaporkan maka pengelolaan keuangan akan terhambat dan akan terjadi ketidak sesuaian keuangan akibat piutang tersebut (Vidya Hangialevi Waninghiyun, et al 2024). Permasalahan ini melibatkan pejabat pengelola keuangan, SPI, bendahara, pejabat penata usahaan, serta Satuan Pengawas Internal (SPI), di samping Dinas Kesehatan dan Bupati Tulungagung sebagai regulator dan terjadi pada periode 2022–2024 saat rumah sakit harus mengelola dana kapitasi BPJS dan non-BPJS dengan beban kerja tinggi yang tidak sebanding dengan kapasitas SDM. Selain itu belum terdapat adanya tim audit internal belum dijalankan yang mana tim tersebut memiliki fungsi untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian internal di RSUD Campurdarat, BPK dan KAP merupakan tim audit eksternal di RSUD Campurdarat. Sehingga keterbatasan ini menimbulkan risiko koordinasi yang lambat, serta akurasi laporan yang kurang optimal. Berdasarkan teori kelembagaan, dan teori sumber daya, kualitas SDM menjadi faktor kunci efektivitas tata kelola, sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam pengelolaan dana publik merupakan amanah untuk mewujudkan masalah (Algifari & Andrini, 2024). Maka, penguatan jumlah dan optimalisasi pegawai serta optimalisasi audit internal sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan BLUD tetap efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Campurdarat telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis akrual sesuai SAP

serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dana yang bersumber dari layanan kesehatan, kamar inap, obat, dan pendapatan sah lainnya dikelola mandiri melalui perencanaan RSB lima tahunan dan RBA tahunan berbasis kinerja, dengan pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam DPA yang disahkan PPKD. Hasil evaluasi menunjukkan pengelolaan keuangan telah sesuai ketentuan tanpa temuan ketidakpatuhan, meskipun fungsi SPI internal masih perlu diperkuat. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi kendala utama yang berpotensi menurunkan efisiensi, memperlambat koordinasi, dan memengaruhi ketepatan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas melalui penambahan tenaga profesional, pelatihan berkelanjutan, dan distribusi tugas yang proporsional guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga keberlanjutan tata kelola keuangan yang akuntabel di RSUD Campurdarat.

DAFTAR REFERENSI

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). *Maqasid Syariah dalam pengembangan ekonomi Islam (analisis komprehensif dan implementasi)*. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Eryana. (2018). Keterbatasan sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. *Iqtishaduna Journal*, 2(Juni), 89–95.
- Fransiska, W., Pratama, M. N. R. F., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Kajian literatur model administrasi integratif dalam hubungan antara struktur organisasi, sistem negara, dan nilai-nilai publik. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1391–1400. <https://doi.org/10.54082/jupin.1473>
- Hartono, L. B., Affandi, A., & Suwanda, D. (2023). Strategi pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada rumah sakit umum daerah (studi kasus pada RSUD BLUD di wilayah Purwasuka Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1477. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1543>
- Hartono, L. B., Affandi, A., & Suwanda, D. (2024). Strategi pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada rumah sakit umum daerah (studi kasus pada RSUD BLUD di wilayah Purwasuka Jawa Barat). *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 6(2), 70–78. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/9936/7899>
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Juliani, H. (2018). Eksistensi badan layanan umum sebagai penyelenggara pelayanan publik. *Al-Jinayah*, 1(2), 47–61. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164>
- Maruta, H., Alam, S., & Keuangan, L. (2015). Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16, 16–28.
- Melani, R. M. S., Rimbano, D., Anggraini, R. M., Saputra, D., Pratama, A. S., Saputra, R., Winanggi, A. E., & Utama, B. S. (2025). Pengaruh strategi manajemen, kualitas SDM,

- dan persepsi terhadap kinerja keuangan (studi literatur pada perusahaan keuangan). *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 59–76. <https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1284>
- Muktiyanto, A., Hadiwidjaja, R. D., & Perdana, H. D. (2025). Pendampingan dan reviu penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas di Kota Tangerang Selatan. *Journal Humaniora*, 3(2), 35–46.
- Pujiani, E. S., Hartono, L. B. A., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Putra, Y. D., & Sobandi, A. (2019). Pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 127–135. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14963>
- Ravenska, N., Ginanjar, Y. R., Nugroho, A. B., & Nurmalia, E. (2025). Efektivitas anggaran berbasis kinerja: Studi tentang pengelolaan keuangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 6(1), 77–90. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i1.1427>
- Reza Nurul Ichan, Lukman Nasution, & Sarman Sinaga. (2021). *Bahan ajar sumber daya manusia (MSDM)*. CV Sentosa Deli Mandiri.
- Rohilah, S. R., Kartini, T., & Indrawan, A. (2025). Analisis pengelolaan keuangan Puskesmas Buniwangi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. *Akuntansi 45*, 6(1), 419–430. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4210>
- Sugiyono, S. (2021). Kajian kelayakan penerapan konsep pengelolaan keuangan BLUD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 29–41. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151>
- Suhaila, S. (2021). Implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Good Governance*, 17(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v17i1.254>
- Waninghiyun, V. H., & E. A. (2024). Optimalisasi pengendalian piutang melalui sistem informasi akuntansi (studi kasus pada PT. Tunas Surya Sentausa). *SBAMER: Jurnal Sains Bisnis dan Akuntansi Modern Era Revolusi*, 4(2), 14–23. <https://doi.org/10.61656/sbamer.v4i2.219>
- Wismoyo, U., & Nasution, J. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 29–40. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v11i1.55199>
- Yusmaniarti, Y., Hernadianto, H., & Ekowati, S. (2025). Pelatihan tata kelola BLUD untuk mewujudkan kemandirian keuangan SMKN di Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 469–477. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i2.2207>
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan terhadap kualitas

laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68–76.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17579>